

TESIS

ANALISIS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU

ANALYSIS OF OPTIMIZATON LOCALLY GENERATED REVENUE TO THE DEVELOPMENT GROWTH OF MAMUJU DISTRICT

**DIAN PUSPITA SARI
A042191034**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ANALISIS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU

ANALYSIS OF OPTIMIZATON LOCALLY GENERATED REVENUE TO THE DEVELOPMENT GROWTH OF MAMUJU DISTRICT

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**DIAN PUSPITA SARI
A042191034**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MAMUJU**

disusun dan diajukan oleh

**DIAN PUSPITA SARI
A042191034**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 18 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

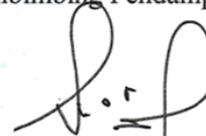
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Siti Haerani, S.E., M.Si.
NIP. 196206161987022001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DIAN PUSPITA SARI
NIM : A042191034
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

ANALISIS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,




DIAN PUSPITA SARI

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi penulis. Atas semua pihak yang telah banyak berperan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga, utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah FEB Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Siti Haerani, SE., M.Si** dan **Dr. Sri Sundari, SE., M.Si., Ak., CA** selaku pembimbing dan tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan;
5. **Dr. Darmawati, SE.,M.Si., Ak., CA.**, **Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.** dan **Dr. Abdul Razak Munir, SE, M.Si, M.Mktg** selaku penguji yang juga berpartisipasi sangat besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan kesempurnaan tesis penulis;
6. Rekan-rekan **BAPENDA, Bidang Kas Umum Daerah dan Anggaran BPKAD Kabupaten Mamuju** yang membantu dalam pengumpulan data, waktu diskusi, pemikiran, dukungan moril kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
7. Saudara-saudaraku seangkatan **Kelas MKD Mamuju 2019** atas segala bentuk kerjsama dan kekompakan dalam pelaksanaan proses perkuliahan hingga selesainya

masa studi;

8. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
9. Anak kembarku tercinta **Muh. Faeyza Alfarizki** dan **Muh. Fathian At-Tirmidzi** yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala waktu malas dan bosan melanda, sehingga penulis masih bertekad kuat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan moril maupun spiritual dalam penyusunan tesis ini.

Terkhusus dan teristimewa penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda tercinta **Hj. Yusniana** dan **Adnan Chalik Pua Tjabai, Amd.**, dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk pengorbanan baik materil maupun doa yang tak henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Akhirnya penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini. Masih banyak kekurangan diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan pada hasil penulisan selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Makassar, Agustus 2021

Peneliti,

Dian Puspita Sari

ABSTRAK

DIAN PUSPITA SARI. *Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Mamuju (dibimbing oleh Siti Haerani dan Sri Sundari)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan cara pengoptimalannya terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Hasil yang diperoleh adalah: 1). Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Mamuju bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 2). Cara pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Mamuju dengan memasang alat *Mobile Payment Online System* (M-POS) kepada semua wajib pungut pajak. Hal ini dilakukan karena dari total target dan realisasi PAD Kabupaten Mamuju tahun 2017-2020 semuanya tidak mencapai 100% sesuai harapan, maka disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah di kabupaten Mamuju belum optimal. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pungut pajak masih sangat kurang dan membuktikan teori dari *Peacock* dan *Wiseman* yang berpendapat bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pembangunan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat*

ABSTRACT

DIAN PUSPITA SARI. *Analysis of Optimization of Regional Original Income on Development Growth in Mamuju Regency* (supervised by Siti Haerani and Sri Sundari)

This study aims to analyze the Optimization of Regional Original Income to the Development Growth of Mamuju Regency.

This study uses a descriptive qualitative method. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Mamuju Regency, West Sulawesi.

The results are: 1) Potential sources of Regional Original Income in Mamuju Regency are sourced from regional taxes, regional levies, income from separated regional wealth management and other legitimate PAD. 2) How to optimize Local Owned Revenue for Development Growth in Mamuju Regency by installing a *Mobile Payment Online System* (M-POS) for all taxpayers to collect taxes. From the total target and realization of PAD in Mamuju Regency in 2017-2020 which did not reach 100% as expected, it was concluded that local revenue in Mamuju Regency was not optimal. This is because awareness of taxpayers is still very low that proves the theory of *Peacock* and *Wiseman* which argues that the government always tries to increase spending, while people do not like to pay more and more taxes to finance government spending.

Keywords: *Regional Original Income, Development Growth, Mamuju Regency, West Sulawesi.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	2
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Konsep Dasar Optimalisasi	16
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
2.1.3 Pertumbuhan Pembangunan	18
2.2. Tinjauan Empiris.....	19
2.2.1 Penelitian Terdahulu	19
BAB III.....	25

KERANGKA PEMIKIRAN	25
3.1 Kerangka Pemikiran	25
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....	26
4.1 Rancangan Penelitian	26
4.2. Situs dan Waktu Penelitian	26
4.3. Sumber Data.....	27
4.4. Prosedur Pengumpulan Data	29
4.5. Teknik Analisis Data.....	31
4.6. Pengecekan Validasi Temuan	31
4.7. Tahap-Tahap Penelitian	32
BAB V.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
5.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju.....	34
5.2. Optimalisasi PAD Kabupaten Mamuju	36
5.3. Potensi sumber-sumber PAD Kabupaten Mamuju.....	41
5.4. Pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Mamuju	41
5.5. Cara pengoptimalan PAD Kabupaten Mamuju.....	46
5.5.1. Pajak Daerah	46
5.5.2. Retribusi Daerah	52
5.5.3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	53
5.5.4. Pengelolaan PAD yang sah lainnya di Kabupaten Mamuju.....	53
5.6. Faktor yang mendukung PAD di Kabupaten Mamuju	55
5.7. Faktor yang menghambat PAD di Kabupaten Mamuju.....	55
BAB VI.....	58
KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
6.1. Kesimpulan	58
6.2. Saran	58
Daftar Pustaka	60
Lampiran.....	63

Daftar Tabel

Tabel 1. APBD tahun anggaran 2017 – 2020.....	4
Tabel 2. Presentase PAD 2017-2020.....	6
Tabel 3. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PAD	21
Tabel 4. Profil Responden yang terlibat pada penelitian ini	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Mamuju 2017	37
Tabel 6. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Mamuju 2018	38
Tabel 7. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Mamuju 2019	39
Tabel 8. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Mamuju 2020	40
Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Mamuju 2017 – 2020*	43
Tabel 10. Presentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamuju	45
Tabel 11. Matrix penetapan hasil perhitungan nilai sewa reklame*	48
Tabel 12. Jumlah Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Mamuju*	49

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Komponen Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Mamuju25
- Gambar 2. Bupati Mamuju periode 2016-2021, Bapak H. Habsi Wahid (tengah)44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara mandiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

Pertumbuhan Pembangunan merupakan proses naiknya produk per kapita di Kabupaten Mamuju dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan dari pertumbuhan pembangunan diukur dengan cara melihat tingkat kesejahteraan

daerah melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pendapatan per kapita.

Salah satu bentuk dari adanya otonomi daerah adalah masing- masing wilayah daerah di Indonesia pasti memiliki anggaran tersendiri yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan dalam APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain – lain. Pada pelaksanaannya, tolak ukur keberhasilan otonomi daerah diukur berdasarkan kinerja ekonomi meliputi tiga aspek penting, yakni institusional, keuangan dan aparatur pemerintah. Dari ketiga aspek tersebut, kemampuan keuangan menjadi persoalan yang krusial dalam menentukan berkembang atau tidaknya otonomi daerah tersebut.

Melalui pengaruh kontrol dari sistem pemerintahan negara Indonesia yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih untuk mengatur sumber daya keuangan mereka secara mandiri. Pemerintah pusat menyediakan Dana Pembangunan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program pembangunan di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber pendapatan sendiri melalui APBD agar supaya mendukung pembangunan di daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun anggaran 2017 hingga 2020 telah melakukan upaya yang progresif terhadap Dana Pembangunan dari segi Pendapatan Daerah yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,030,499,768,947 kemudian tahun 2018 pertumbuhannya sebesar Rp. 1,094,970,134,833 lalu meningkat lagi di tahun 2019 yaitu Rp.1,140,183,392,388 dan bertambah meningkat di tahun 2020 sebesar Rp1,154,869,459,698.

Kenaikan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju tersebut tentu berdampak terhadap Dana Pembangunan yang ada di Kabupaten Mamuju. Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah memerlukan dana pembangunan yang tidak sedikit, baik berupa pembiayaan rutin maupun biaya berkala. Oleh karena itu, selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 pertumbuhan biaya belanja daerah lebih besar dari pada Pendapatan Daerah berdasarkan APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju. Di tahun 2017 Rp. 1,063,987,089,978 lalu di tahun 2018 sebesar Rp1,129,740,837,725 kemudian meningkat juga di tahun 2019 yakni sejumlah Rp. 1,161,981,065,159 dan di tahun 2020 sebesarRp1,177,661,064,989. Sehingga mencerminkan bahwa APBD Kabupaten Mamuju dari tahun 2017 hingga 2020 belum optimal karena selalu mengalami defisit, meskipun pendapatan daerah meningkat tapi belanja daerah juga meningkat bahkan lebih besar dari pada pendapatan daerah seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. APBD tahun anggaran 2017 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Defisit
1	2017	Rp1,030,499,768,947	Rp1,063,987,089,978	Rp33,488,088,498
2	2018	Rp1,094,970,134,833	Rp1,129,740,837,725	Rp34,770,702,892
3	2019	Rp1,140,183,392,388	Rp1,161,981,065,159	Rp21,797,672,771
4	2020	Rp1,154,869,459,698	Rp1,177,661,064,989	Rp22,791,605,291

(diolah dari: <http://mamujukab.go.id/laporan-keuangan>)

Persentase nilai defisit APBD Kabupaten Mamuju sangat fluktuatif. Pada tahun 2018, APBD mengalami kenaikan defisit sebesar 4% atau senilai Rp.1,282,614,394 akan tetapi ditahun 2019 pemerintah berhasil menurunkannya hingga -37% atau senilai Rp.12,973,030,121 namun ditahun 2020 defisit kembali meningkat sebesar 5% atau senilai Rp.993,932,520. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah masih bergantung pada suntikan dana dari pemerintah pusat yang dapat dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2017 hingga 2020 masih lebih sedikit dibanding Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya yang bukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah yang sah lainnya. Sebagai daerah otonom, pemerintah Kabupaten Mamuju belum dapat melepaskan diri dari bantuan pemerintah pusat dalam hal mengelola keuangannya. Sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2017 sebesar

Rp1,030,499,768,947 yang bersumber dari PAD 7 %, Dana Perimbangan 77%, dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya 16%. Sementara di tahun 2018 total sumber pendapatan daerah kabupaten Mamuju Rp1,094,970,134,833 yang bersumber dari PAD 7%, Dana Perimbangan 79%, dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya 13 % yang di tahun tersebut berkurang dari tahun sebelumnya, namun Dana Perimbangan meningkat 2%.

Di tahun 2019, total Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju adalah Rp1,140,365,392,388 bersumber dari PAD 8%, Dana Perimbangan 77%, dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya 16%. Kemudian di tahun 2020, total sumber pendapatan daerah sebanyak Rp1,154,869,459,698 yang bersumber dari PAD 10%, Dana Perimbangan 75%, dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya 15%. Peneliti melihat adanya penurunan persentase di sumber dana perimbangan dan pendapatan daerah sah lainnya pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, agar pendapatan daerah Kabupaten Mamuju bisa ditingkatkan lagi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dari tahun 2017- 2020 diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya. Meskipun jumlah PAD Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 sumbangsih Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Lainnya yang dipisahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan sumber PAD yang sah lainnya yang justru mengalami peningkatan. Penurunan persentase Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Lainnya sebagai sumber PAD akan berdampak terhadap Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Mamuju dimasa yang akan datang.

Tabel 2. Presentase PAD 2017-2020

Sumber PAD	Persentase PAD Kabupaten Mamuju			
	2020	2019	2018	2017
Pajak Daerah	34 %	35 %	35 %	30 %
Retribusi Daerah	12 %	32 %	33 %	31 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Lainnya yang dipisahkan	6 %	7 %	6 %	5 %
PAD yang sah lainnya	48 %	27 %	27 %	33 %
Total:	100 %	100 %	100 %	100 %

(diolah dari: <http://mamujukab.go.id/laporan-keuangan>)

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah melalui sektor pajak kendaraan. Contoh kasus di mana sampai bulan Maret 2020, telah tercatat bahwa di Kabupaten Mamuju mempunyai tunggakan sesuai dengan yang diberitakan oleh Mohammad Naim Samad pada media online *LensaSulawesi* dengan jumlah tunggakan pajak terbanyak sebanyak total 4,494 kendaraan yang berasal dari kendaraan berpelat merah. Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pokok Rp. 1,234,149,600 dan denda Rp. 296,195,904. Dengan rincian: 3,889 kendaraan roda dua (R2), nilai PKB Pokok Rp. 382,485,300 dan denda Rp. 91,796,472. Sementara roda empat (R4) sebanyak 605 dengan jumlah PKB pokok Rp. 851,664,300 dan denda Rp. 204,399,432 (Samad 2020).

Oleh sebab itu, pengoptimalan dari sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju perlu diupayakan untuk meningkatkan Pertumbuhan Pembangunan dimasa depan. Hal ini bisa menjadi lebih efektif karena dengan telah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan yang bebas, nyata dan bertanggung jawab sebagai daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi.

Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Desentralisasi oleh pemerintah kepada daerah otonom memberikan kesempatan bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengatur, membenahi dan menggali potensi daerah tersebut tentunya hanya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya. Setiap daerah memiliki kewenangan atas kebijakan lokal dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki (Pepinsky, 2011). Melalui hal tersebut diharapkan agar pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai kemandirian daerah.

Keleluasaan dari setiap daerah dalam mengoptimalkan otoritas administratifnya dapat dilihat dari berapa banyak potensi sumber-sumber keuangan yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan dan didistribusikan pada berbagai kegiatan pembangunan daerah. Jika daerah tidak mampu secara mandiri mengoptimalkan otoritas administratif yang dimilikinya, maka semakin besar pula kendala pembiayaan pembangunan. Kendala ini akan berdampak pada semakin terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya membuat daerah akan selalu semakin tergantung pada pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah mendorong daerah untuk menjadi mandiri, salah satunya dengan meningkatkan

kemampuan finansialnya dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju khususnya yang bisa dilihat melalui meningkatnya dana pembangunan.

Dana pembangunan adalah biaya yang digunakan untuk mencapai rangkaian perubahan pembangunan suatu daerah. Pada penelitian ini dana pembangunan yang dimaksud merupakan dana yang terdiri dari komponen Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju diluar belanja rutin dalam kurun waktu 2017-2020.

Namun dana pembangunan di Kabupaten Mamuju belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah membelanjakan porsi besar anggaran tahunannya untuk pegawai dan biaya tetap, sehingga menyisakan hanya sedikit dana untuk inisiatif pembangunan. Dana dari anggaran nasional sering tidak fleksibel, dan tidak terkoordinasi baik dengan perencanaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi program pembangunan. Hal ini semakin memperburuk disparitas antar wilayah.

Persoalan utama pendanaan pembangunan daerah, antara lain: ketergantungan daerah yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat; anggaran dan sistem manajemen keuangan yang tidak fleksibel; pemanfaatan transfer pemerintah pusat yang tidak efektif untuk menutup kesenjangan di wilayah tertinggal; minimnya keterlibatan publik dalam perencanaan, yang artinya program pembangunan tidak selalu selaras dengan kebutuhan lokal; dan

kurangnya inovasi dalam mengembangkan tanggapan baru bagi tantangan pembangunan lokal.

Hasil penelitian Indrawani (2019) mengungkapkan bahwa pertumbuhan pembangunan di *Kota Pariaman* mempunyai kinerja yang baik hal ini terbukti dengan perkembangan yang terjadi pada penerimaan dan pertumbuhan riil PAD tahun 2012-2017 di mana perkembangan dan pertumbuhan PAD kota Pariaman selalu bergerak positif walaupun terjadi kenaikan dan penurunan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang ***“Analisis optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Mamuju”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan beberapa masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana cara pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui dan menganalisis potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Mamuju
2. Mengetahui dan menganalisis cara pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah

terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Mamuju.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi secara teoritis dan praktis kepada institusi pemerintah, akademisi, peneliti, ataupun masyarakat umum.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang. Kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya ditujukan untuk peningkatan peranan PAD dalam upaya peningkatan pembangunan. Dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, institusi pemerintah membutuhkan banyak masukan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari hasil penelitian ini yang nantinya bisa menjadi tolak ukur mengoptimalkan pendapatan asli daerah terhadap dana pembangunan khususnya di Kabupaten Mamuju.

Bagi aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumber pemikiran bagi insan akademisi guna menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan daerah khususnya menyangkut kajian kebijakan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, khususnya bagi peneliti yang ingin mengetahui tentang pengoptimalan

PAD terhadap Dana Pembangunan.

Bagi akademisi, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa atau dosen yang ingin mendiskusikan lebih dalam tentang proses pengoptimalan PAD terhadap Dana Pembangunan.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju agar bisa bersinergi bersama institusi pemerintah untuk kemaslahatan bersama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Berikut ini sajian susunan sistematika penulisan pada proposal penelitian ini terdiri dari empat Bab:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian secara teoritis dan praktis, Definisi dan Istilah, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan Teori dan Konsep, Tinjauan Empiris melalui perbandingan penelitian terdahulu.

BAB III. Kerangka Pemikiran yang merupakan gambaran umum terhadap apa yang akan diteliti dan capaian yang ingin dituju.

BAB IV Metode Penelitian yang menyajikan Rencana Penelitian, Kehadiran Peneliti, Situs dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan

Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Validasi Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

Grand theory yang menjadi landasan acuan pada penelitian ini adalah Teori yang diungkapkan oleh *Peacock* dan *Wiseman*. Mereka mendasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam analisis tersebut, Pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Padahal kenyataannya masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut (Mangkoesobroto, 2016).

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyangkut 3 bidang analisis yang saling terkait satu bidang dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi; (1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensi untuk meningkatkan pendapatan tersebut. (2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dari faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat. (3) Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil analisis pendapatan, pengeluaran, dan anggaran tersebut merupakan komponen dalam penting menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih

besar dari pada pengeluaran, maka akan terjadi surplus anggaran. Begitu juga sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada dari tahun ke tahun dan proyeksi kecenderungannya untuk masa yang akan datang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan lebih dini guna menjaga stabilitas anggaran dari tahun ke tahun. Dana Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya.

Komponen PAD adalah salah satu tolak ukur yang mempengaruhi Dana Pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, dimensi lain yang mempengaruhi Dana Pembangunan di daerah adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang sah lainnya. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada komponen PAD saja karena komponen tersebut merupakan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerahnya, dan menjadi kewenangan daerah sebagai bentuk amanat pelaksanaan otonomi daerah.

Merujuk dari sifat dari komponen PAD yang merupakan kewenangan seutuhnya yang dimiliki suatu daerah, mestinya pengelolaan komponen PAD tersebut dapat dimaksimalkan sehingga tercipta pertumbuhan yang baik tiap tahunnya pada dimensi yang mempengaruhi Dana pembangunan tersebut. Oleh

karenanya, jika pertumbuhan komponen PAD yang baik sangat mungkin bisa berbanding lurus dalam mempengaruhi Dana Pembangunan yang juga akan ikut baik.

Demikian juga sebaliknya, jika komponen PAD menunjukkan perkembangan yang negatif maka Dana Pembangunan juga akan menjadi lebih kecil pada tahun anggaran berikutnya. Sehingga, jika terjadi kenaikan komponen PAD tiap tahun anggaran maka Dana pembangunan juga akan lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya, juga ketika terjadi penurunan kenaikan komponen PAD dapat menjadikan Dana pembangunan akan lebih kecil.

Asumsi ini berdasarkan dari Teori *Peacock* dan *Wiseman* yang berpendapat bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori *Peacock* dan *Wiseman* adalah pemerintah menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesobroto, 2016).

Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Untuk itu dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan dan mengatasi hal

tersebut. Kajian teori mengenai optimalisasi dimulai dari pengertian optimalisasi secara umum, pengertian optimalisasi menurut beberapa ahli dan pengertian optimalisasi pendapatan asli daerah yang akan dibahas secara rinci adalah sebagai berikut:

2.1.1 Konsep Dasar Optimalisasi

Tolak ukur optimalisasi dilihat dari tindakan atau kegiatan yang meningkatkan dan menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Upaya optimalisasi pendapatan daerah bisa digunakan melalui berbagai aspek untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dengan cara pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk ditingkatkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Efisiensi pemungutan pajak akan mampu meningkatkan kuantitas PAD lebih cepat dan mudah walaupun tidak dilakukan perluasan penggalian sumber pendapatan baru. Menurut Hotniar Siringoringo, optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimalkan biaya (Siringoringo, 2005).

Dasar dari makna optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai

sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Pengertian PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomidaerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Menurut UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Penerimaan Pusat dan Daerah, komponen sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan yang sah lainnya.

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu;
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 3. Dana Alokasi Khusus ((DAK)
 4. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.
 5. Dan lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah.

2.1.3 Pertumbuhan Pembangunan

Pertumbuhan Pembangunan yang dimaksud pada penelitian ini adalah proses naiknya produk per kapita di Kabupaten Mamuju dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan teori dari Budiarto bahwa Keberhasilan dari pertumbuhan pembangunan diukur dengan cara melihat tingkat kesejahteraan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan daerah adalah pendapatan total atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pendapatan per kapita (Budiarto, Sumarno, & Sianturi, 2014).

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Samad berjudul “*Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Rokan Hilir berpeluang meningkatkan potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan sekitar 20 hingga 50 persen, khususnya pajak penerangan jalan, pemanfaatan air bawah tanah, retribusi kesehatan, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil minyak dan bagi hasil pajak. Dalam pengelolaan penerimaan, belum memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin bahwa prosedur dan kebijakan manajemen yang dibuat telah ditaati serta minimnya petugas di lapangan (Samad dkk., 2013).

Hasil penelitian Wulansari menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa terdapat *flypaper effect* pada Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (Wulansari, 2015).

Penelitian lain yang dipaparkan oleh Nur Fajariani beberapa hal antara lain; 1). rasio keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir 2). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Penelitian ini

menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dimana menggunakan variabel-variabel dengan menggunakan rumus rasio keuangan daerah, analisis regresi linear berganda dan melakukan uji t serta uji F untuk menjawab hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Dilihat dari rasio keuangan di Kabupaten Mamuju masih kurang sehingga pemerintah Kabupaten Mamuju masih bergantung kepada pemerintah pusat, 2). Pada analisis regresi ketiga variabel independen (X1, X2 dan X3) secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), karena ketiga variabel dependen menunjukkan nilai T hitung \leq T tabel atau sig \geq 0,05, artinya Ho diterima dan H1, H2 dan H3 ditolak. Sedangkan berdasarkan analisis korelasi menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terdapat pengaruh yang kuat dan positif (+) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dimana ditunjukkan nilai R sebesar 0,669 dan koefisien determinasi atau angka *R square* adalah sebesar 0,447 (Fajariani, 2019).

Nurmala dan Resi Puspita dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan" mengungkapkan hasil dari penelitiannya berdasarkan rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan, dari tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria rasio efektivitas Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.327 menunjukkan kriteria sebesar 100% Sudah Efektif (Nurmala dkk., 2018).

Nikolas Kaliele, Karsiman, dan Purnomo dalam penelitian mereka yang

berjudul “*Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan di Kota Sorong*” menyatakan bahwa Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD (Kaliele, 2017).

Hasil penelitian yang tentang “*Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017*” oleh Sri Rahayu mengungkapkan bahwa Kota Pariaman mempunyai kinerja yang baik hal ini terbukti dengan perkembangan yang terjadi pada penerimaan dan pertumbuhan riil PAD, walaupun mengalami fluktuasi tingkat kenaikan dan penurunannya tidak begitu jauh. Dari awal tahun penelitian yaitu dari tahun 2012-2017 perkembangan PAD kota Pariaman pertumbuhan PAD selalu bergerak positif walaupun terjadi kenaikan dan penurunan (Indrawani, 2019).

Tabel 3. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PAD

No	Penulis	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	R.Putra Samad dan Rita Yani Iyan	2013	“ <i>Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan PAD dan • Dana Perimbangan keuangan daerah 	Kualitatif dan kuantitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Rokan Hilir berpeluang meningkatkan potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan sekitar 20 hingga 50 persen

No	Penulis	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
2	Dessy Tri Wulansari	2015	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect”	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • DAU • DBH • DAK 	Kuantitatif	PAD, DAU, dan DBH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
3	Nur Fajariani	2019	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Mamuju”	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • DAU • Dana Perimbangan 	kualitatif dan kuantitatif	Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terdapat pengaruh yang kuat dan positif (+) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dimana ditunjukkan nilai R sebesar 0,669 dan koefisien determinasi atau angka R square adalah sebesar 0,447.
4	Nurmala & Resi Puspita	2018	“Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas, • Kontribusi 	Kualitatif	hasil dari penelitiannya berdasarkan rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan, dari tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria rasio efektivitas Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.3 27 menunjukkan kriteria sebesar

No	Penulis	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
						100% Sudah Efektif
5.	Nikolas, dkk		<i>“Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan Di Kota Sorong”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber PAD • Total • PAD 	Kualitatif	bahwa Kontribusi sumber- sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber- sumber PAD tersebut terhadap total PAD.
6	Sri Ayu Indrawani	2019	<i>“Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan riil PAD • Rasio efektivitas PAD • Rasio elastisitas PAD • Tax ratio PAD 	Kuantitatif	Kota Pariaman mempunyai kinerja yang baik hal ini terbukti dengan perkembangan yang terjadi pada penerimaan dan pertumbuhan riil PAD, walaupun mengalami fluktuasi tingkat kenaikan dan penurunannya tidak begitu jauh. Dari awal tahun penelitian yaitu dari tahun 2012-2017 perkembangan PAD kota Pariaman

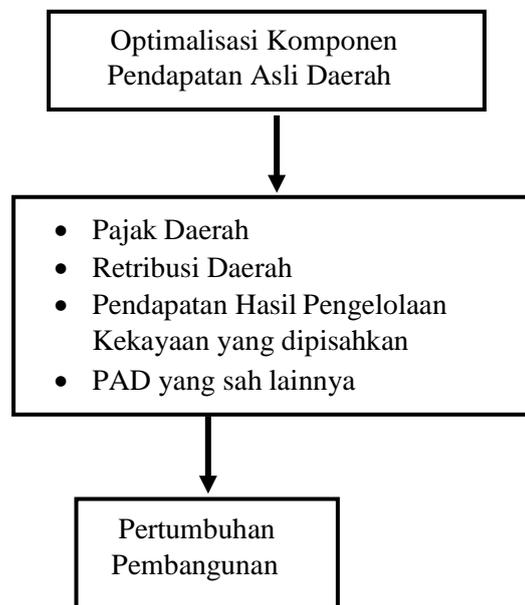
No	Penulis	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
						pertumbuhan PAD selalu bergerak positif walaupun terjadi kenaikan dan penurunan.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Menurut Halim Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2002). Pendapatan Daerah menurut undang-undang diperoleh melalui tiga Aspek, yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada analisis optimalisasi PAD terhadap Pertumbuhan Pembangunan. Seperti yang tergambar pada bentuk kerangka pemikiran yang ada pada Diagram berikut ini:



Gambar 1. Komponen Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Mamuju